

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL (Studi Kasus di BSD Serpong dan Pasar Manis Purwokerto)

Oleh: Ranjani, Lintang Ayu S, dan Mitha Nurhikmah

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Jenderal Soedirman

Abstrak : Pertumbuhan pasar modern yang menggeser pasar tradisional perlu mendapat perhatian pemerintah. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Pasar BSD Serpong pada tahun 2004 telah dinilai sebagai pasar yang telah berhasil dimodernisasi. Sedangkan salah satu pasar yang direvitalisasi pada tahun 2016 adalah Pasar Manis Purwokerto. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses modernisasi pasar tradisional di pasar BSD Serpong, bagaimana implementasi kebijakan di pasar Manis Purwokerto, serta bagaimana kebijakan revitalisasi pasar tradisional untuk pengembangan pasar tradisional pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk studi kasus terpancang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses modernisasi pasar tradisional di pasar BSD Serpong telah mengintegrasikan antara modernisasi fisik dan non fisik. Implementasi Kebijakan revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Manis Purwokerto baru pada aspek fisik. Sementara aspek manajemen, ekonomi, dan sosial sudah diupayakan namun belum maksimal. Kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Indonesia seharusnya mencakup aspek fisik, manajemen, sosial, dan ekonomi secara keseluruhan.

Kata kunci: Kebijakan, Implementasi, Revitalisasi, Pasar Tradisional

Abstract : The growth of the modern market that shifts the traditional market needs to get the government's attention. One of the government's efforts to overcome this is through the traditional market revitalization policy. BSD Serpong market in 2004 has been assessed as a market that has been successfully modernized. While one of the revitalized market in 2016 is Manis Market Purwokerto. This study aims to see how the process of modernization of traditional markets in BSD Serpong market, how the implementation of policy in the Manis Market of Purwokerto, and how the policy of revitalizing traditional markets for traditional market development in general. This research uses qualitative method with form of stuck case study. The results of this study indicate that the process of modernization of traditional markets in BSD Serpong market has integrated between physical and non-physical modernization. Implementation of revitalization policy of Traditional Market in Manis Market of Purwokerto new to physical aspect. While management, economic, and social aspects have been attempted but not maximized. Traditional market revitalization policies in Indonesia should cover the physical, management, social and economic aspects as a whole.

Keywords: Policy, Implementation, Revitalization, Traditional Market

PENDAHULUAN

Pasar adalah salah satu pranata ekonomi, tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam kegiatan tukar-menukar

untuk memenuhi kebutuhan keduanya. Seiring dengan perkembangan masyarakat, semakin berkembanglah pasar, hingga

kemudian dikenal pasar tradisional dan pasar modern.

Berkembangnya pasar modern sesuai dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan tempat berbelanja yang bersih, nyaman, aman, dan mutu barang yang terjamin. Namun, berkembangnya pasar modern mulai menggeser eksistensi pasar tradisional. Hasil studi Nielsen (Poesoro, 2007:2) menjelaskan, rata-rata pasar modern di Indonesia tumbuh 31,4% per tahun, sedangkan pasar tradisional menyusut 8% per tahun. Penjualan supermarket pun tumbuh rata-rata 15% per tahun, sementara penjualan pasar tradisional turun 2% per tahun.

Fenomena mulai tergesernya eksistensi pasar tradisional oleh pasar

modern perlu mendapat perhatian semua pihak, terutama pemerintah. Keberadaan pasar tradisional harus tetap dijaga karena merupakan urat nadi perekonomian masyarakat sekaligus salah satu tulang punggung perekonomian nasional.

Salah satu kebijakan yang dimaksudkan untuk menjaga eksistensi pasar tradisional adalah kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Kebijakan ini telah dilaksanakan sejak pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan dilanjutkan oleh pemerintahan Joko Widodo dengan target 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia selama lima tahun pemerintahannya. Berikut revitalisasi pasar tradisional selama tahun 2015–2016.

Tabel 1. Revitalisasi Pasar Tradisional Tahun 2015–2016

No.	Tahun	Dana Revitalisasi		Jumlah Pasar	Keterangan
		Sumber	Jumlah (Rp)		
1.	2015	1. APBN	1.362.800.000.000,00	182	Realisasi revitalisasi 99%
		2. DAK	1.075.900.000.000,00	770	
		3. Kementerian Koperasi	78.000.000.000,00	65	
2.	2016	1. APBN	1.466.500.000,00	168	<ul style="list-style-type: none"> • Penghematan anggaran dari 35 unit pasar • 15 unit pasar dengan capaian 75% • 10 unit pasar dengan capaian 50%
		2. DAK	1.006.995.080.000,00	710	

Sumber: <http://www.presidentri.go.id/artikel-terpilih/mensukseskan-program-revitalisasi-pasar-tradisional.html>

Berkaitan dengan implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional di atas, Menteri Perdagangan pada masa pemerintahan SBY, Gita Wiryawan menyatakan pasar BSD Serpong dapat

menjadi acuan dalam hal pembangunan fisik maupun pengelolaan pasar tradisional (<http://www.antaraneews.com/berita/367157/mendag-pasar-bsd-serpong-acuan-revitalisasi>). Pada era Menteri

Perdagangan Enggartiasto Lukita, pasar BSD Serpong tetap sebagai percontohan pengelolaan pasar tradisional. Sindownews.com memberitakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjadikan Pasar Modern BSD City Tangerang, sebagai percontohan bagi pasar rakyat¹ di seluruh wilayah di Tanah Air. Dalam acara yang digelar di Ballroom Aston Hotel, Kuta, Bali, pada Rabu (4/10/2017), Kemendag menggandeng Sinar Mas Land sebagai salah satu narasumber, untuk memberikan bimbingan pengelolaan pasar modern yang menjadi percontohan, yaitu pasar modern BSD City (<https://ekbis.sindonews.com/read/1245496/34/kemendag-jadikan-pasar-modern-bsd-sebagai-percontohan-1507131457>).

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah yang melaksanakan kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Kebijakan tersebut diimplementasikan di Pasar Manis Purwokerto. Selain pembangunan fisik Pasar Manis, beberapa pengembangan yang telah dilaksanakan di pasar tersebut adalah sistem zonasi, keamanan yang terjamin, dan instalasi kebersihan yang memadai. Hasil pra-

¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, konsep atau istilah pasar tradisional berubah menjadi pasar rakyat. Dalam artikel ini, kedua konsep tersebut digunakan secara bergantian sesuai dengan konsep yang digunakan dalam sumber kutipan.

penelitian menunjukkan pengunjung pasar mengaku revitalisasi Pasar Manis meningkatkan motivasinya untuk mengunjungi pasar tradisional tersebut. Disebutkannya, bahwa ada hal yang tidak ditemukan di pasar modern, namun bisa ditemukan di Pasar Manis saat ini, yaitu kepuasan tawar-menawar dengan kenyamanan berskala pasar modern.

Sehubungan dengan deskripsi ringkas mengenai pasar BSD Serpong serta Pasar Manis Purwokerto Kabupaten Banyumas, menarik untuk dikaji: (a) bagaimana proses modernisasi pasar tradisional di Pasar BSD Serpong? (b) bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Manis Purwokerto? (iii) bagaimana kebijakan revitalisasi pasar tradisional untuk pengembangan pasar tradisional pada umumnya? Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjawab rumusan masalah tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Revitalisasi Pasar Tradisional dan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8125 tentang Pasar Rakyat Sebagai Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye (1981) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Anderson (1979) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.

Salah satu kebijakan pemerintah yang relevan dengan kebijakan revitalisasi pasar tradisional adalah SNI 8125 tentang Pasar Rakyat. Sesuai dengan SNI 8125, pasar rakyat seharusnya memenuhi 3 persyaratan, yaitu: (1) persyaratan umum: lokasi pasar, kebersihan dan kesehatan, keamanan dan kenyamanan; (2) persyaratan teknis: ruang dagang, aksesibilitas dan zonasi, pos ukur ulang dan sidang tera, fasilitas umum, elemen bangunan, keselamatan dalam bangunan, pencahayaan, sirkulasi udara, drainase, ketersediaan air bersih, pengelolaan air bersih, pengelolaan sampah, sarana telekomunikasi; dan (3) persyaratan pengelolaan: prinsip pengelolaan pasar, tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar, prosedur kerja pengelola pasar, struktur pengelola pasar, pemberdayaan pedagang dan pembangunan pasar.

2. Konsep Implementasi

Laswell (1956) mengatakan, agar ilmuwan dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang apa sesungguhnya kebijakan publik, harus diurai menjadi beberapa bagian sebagai tahapan-tahapan, yaitu: *agenda-setting*, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi dan terminasi. Berdasarkan siklus kebijakan tersebut terlihat secara jelas bahwa implementasi hanyalah bagian atau salah satu tahap dari proses besar

bagaimana suatu kebijakan publik dirumuskan.

Schneider (1982) menyebutkan 5 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: *viability*, *theoretical integrity*, *scope*, *capacity*, dan *unintended consequences*. Sabatier (1986) menyebut, setelah mereview berbagai penelitian implementasi, ada 6 variabel utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi, yaitu: (a) tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten; (b) dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan; (c) proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan kelompok sasaran; (d) komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan; (e) dukungan para *stakeholder*; dan (f) stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik

Ripley dan Franklin (1986) menjelaskan ada 2 pendekatan untuk menilai implementasi kebijakan. Pertama terfokus pada kepatuhan. Pendekatan ini melihat bagaimana implementor kebijakan mematuhi sesuai prosedur, jadwal, dan batasan yang dilakukan. Kedua bertanya bagaimana pelaksanaannya, apa yang dicapai?, mengapa?. Pendekatan ini dicirikan sebagai induktif dan empiris. Berdasarkan uraian tersebut, maka indikator untuk pendekatan ini yaitu: (1)

banyaknya aktor yang terlibat; (2) kejelasan tujuan; (3) perkembangan dan kerumitan program; (4) partisipasi pada semua unit pemerintahan; dan (5) faktor-faktor yang tidak terkendali yang mempengaruhi implementasi

Implementasi kebijakan menjadi “jembatan” karena melalui tahapan ini dilakukan *delivery mechanism*, yaitu ketika berbagai *policy output* yang dikonversi dari *policy input* disampaikan kepada kelompok sasaran sebagai upaya nyata untuk mencapai tujuan kebijakan. Hal senada dikatakan oleh Grindle (1980) yang menyebut bahwa “*in involves, therefore, the creation of “policy delivery system, in which specific means are designed and pursued in the expectation of arriving at particular end”*”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memfokuskan pada: (a) Proses modernisasi pasar tradisional di Pasar BSD Serpong menurut pandangan informan; (b) Implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Manis Purwokerto menurut pandangan informan; (c) Kebijakan revitalisasi pasar tradisional untuk pengembangan pasar tradisional menurut pandangan informan. Sesuai dengan fokus, digunakanlah metode penelitian kualitatif dengan bentuk *embadded case study* (Yin, 2012).

Penelitian ini dilaksanakan di pasar BSD Tangerang dan pasar Manis

Kabupaten Banyumas, dengan informan penelitian: (a) aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Manis Kabupaten Banyumas selaku pengelola pasar Manis, (b) Jajaran manajemen pasar BSD Serpong, (c) pedagang, pengurus paguyuban, dan koperasi pasar Manis Purwokerto, (d) pedagang pasar BSD Serpong, serta (e) pengunjung dan pembeli pasar Manis Purwokerto dan pasar BSD Serpong. Untuk menetapkan informan tersebut digunakan teknik *purposive sampling*.

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, sesuai dengan sumber data penelitian ini yaitu: (a) informan, (b) tempat dan peristiwa, dan (c) dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif (Miles dan Huberman, 1984). Untuk mewujudkan keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan 4 kriteria yaitu: (a) derajat kepercayaan, (b) transferabilitas data, (c) dependabilitas data, dan (d) konfirmabilitas data (Moleong, 1990).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Modernisasi Pasar Tradisional di Pasar BSD Serpong

Pasar BSD Serpong berada di pusat kota, tepatnya di BSD City Sektor 1.1, Jl. Letnan Soetopo, Rawa Mekar Jaya,

Serpong Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan mempunyai beberapa pasar tradisional selain pasar BSD Serpong, seperti pasar Paramount Modern, pasar Delapan Alam Sutera, pasar Segar Graha raya, pasar Cimanggis, dan pasar Ciputat. Selain pasar tradisional, beberapa pasar modern yang ada di Kota Tangerang Selatan adalah Summarecon Mall Serpong, Aeon Mall, IKEA Alam Sutera, Living World Alam Sutera, mal @ alam sutera, The Breeze BSD City, Mal Teraskota, dan pasar modern lainnya.

Sebelum seperti sekarang ini, pasar BSD Serpong relatif kecil karena hanya terdiri dari 25 lapak, dengan kondisi yang kumuh, becek, kotor, tidak aman, tidak berzonasi, serta tidak memiliki fasilitas umum seperti mushola dan MCK. Seiring dengan bertambahnya penduduk di sekitar pasar BSD, PT Sinar Mas Land kemudian memodernisasi pasar tradisional tersebut karena dinilai potensial dari sisi profit jika mampu mensinergikan keunggulan pasar tradisional dengan nilai-nilai modern pengelolaan pasar. Oleh karenanya pada tahun 2004 PT Sinar Mas Land memodernisasi pasar BSD Serpong itu menjadi pasar modern di atas lahan seluas 32.000 m² dengan luas bangunan 14.000 m² dan luas parkir 18.000 m².

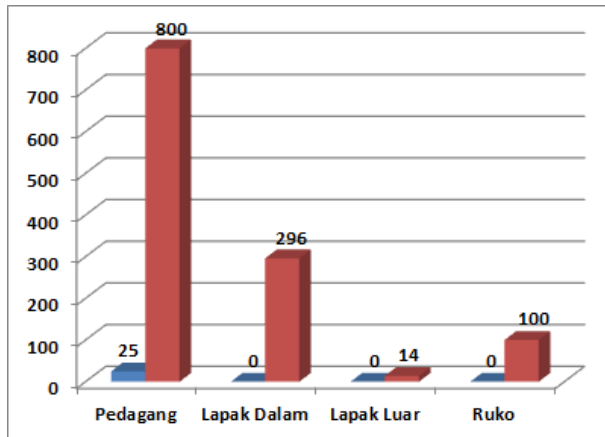
Setelah modernisasi, kondisi bangunan fisik pasar BSD Serpong berubah secara signifikan. Bangunan

fisik pasar dirancang beratap tinggi agar sirkulasi udara berlangsung secara alami sehingga pasar tidak pengap dan pengunjung pun tidak kegerahan. Sebagian atap bangunan dirancang transparan agar menghasilkan penerangan bagi pasar. Selain itu, tampak enam pintu pasar yang lapang sehingga memudahkan pengunjung masuk-keluar pasar. Fasilitas umum berupa mushola, ATM center, area hijau, lahan parkir luas, kantor pengelola, dan pos keamanan.

Tidak hanya aspek bangunan, pengelola pasar juga memperhatikan pengaturan letak lapak, kios, dan ruko. Dalam desain pasar, tampak lapak tetap menjadi fokus utama sehingga diletakkan di tengah-tengah areal pasar dan dikelilingi oleh kios dan jajanan ruko. Pengelola pasar juga mengatur secara tegas zoning areal kering dan basah, di mana suplai air bersih dan drainase dirancang demikian mendukung areal basah. Dengan demikian, kebersihan, kerapihan, keteraturan dan kenyamanan pasar BSD tampak diperhatikan.

Setelah modernisasi, jumlah pedagang, kios, lapak, dan rukonya pun bertambah secara signifikan. Berikut diagram yang menggambarkan perkembangan pasar BSD Serpong setelah proses modernisasi.

Gambar 1. Jumlah Pedagang, Kios, dan Los Pasar BSD Serpong Setelah Modernisasi



Sumber: Manajemen Pasar BSD Serpong, 2018

Dari sisi pengelolaan, pengelolaan pasar BSD Serpong dipimpin seorang manajer pengelola pasar yang membawahi bidang keuangan, teknik, *customer service*, keamanan, serta parkir dan kebersihan. Meski tetap menggunakan konsep pasar tradisional, namun pengelolaan pasar BSD Serpong menggunakan konsep manajemen modern. Intervensi dari pemerintah maupun manajemen BSD, hampir relatif tidak ada. Pengelola pasar memiliki kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pasar, termasuk penentuan mitra kerja sehingga dapat diperoleh mitra terbaik bagi pengelolaan pasar.

Pasar BSD menyediakan barang dagangan yang beraneka ragam dan lengkap, baik produk lokal maupun impor. Segala bahan makanan segar, daging, *seafood*, sayuran, buah-buahan, bumbu

dapur, macam-macam bahan makanan (baik yang halal maupun tidak halal), bahan makanan yang unik dan sulit didapat seperti bumbu masakan *chinese*, *europelan* atau *korean food*, bahan pembuat kue yang unik-unik tersedia di pasar ini. Semua barang dagangan tersebut tertata rapi dan tampak bersih. Selain menjual bahan makanan, di area pasar dan ruko juga tersedia kios pakaian, toko obat dan jamu, kios pernak-pernik penghias rumah, perlengkapan bayi, toko kosmetik, *money changer*, bahkan lembaga kursus (*sempoa*).

Sistem pengelolaan pasar BSD berbasis pada ketentuan tertulis berbentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) antara pengelola pasar BSD dengan pedagang. MoU berisi: (a) hak dan kewajiban pengelola dan pedang, (b) pengaturan kualitas barang yang diperdagangkan, (c) mekanisme pelayanan di pasar, (d) retribusi pasar, (e) pengelolaan kebersihan dan lingkungan pasar. MoU juga mengatur sistem zonasi serta mekanisme peringatan kepada pedagang yang melanggar tata tertib, mulai dari Surat Peringatan (SP) 1, SP2, dan SP3. Untuk mendukung pelaksanaan tata tertib pasar, setiap hari petugas keamanan melaksanakan pemantauan dan akan mengambil tindakan tegas jika ada pedagang yang melanggar sistem zonasi ataupun tata tertib yang telah ditetapkan.

Pengelola pasar BSD Serpong juga melakukan pemantauan harga barang dan mekanisme penjualan. Hasil pemantauan akan tampak pada papan tulis kantor dan menjadi bahan laporan perkembangan harga pasar kepada dinas terkait. Pada umumnya, harga penjualan komoditas di pasar BSD lebih mahal dibandingkan pasar tradisional lainnya. Meski demikian, mekanisme tawar-menawar harga barang, tetap dipertahankan pengelola pasar BSD karena hal tersebut dinilai sebagai keunggulan utama pasar tradisional.

Sistem zonasi serta pemantauan harga barang sebagaimana disebutkan di atas, dikenal dengan modernisasi fisik. Modernisasi tersebut juga mengatur aspek fisik lainnya, mulai dari prasarana, kebersihan, kenyamanan, penataan lapak, kios dan ruko, serta keamanan pasar. Guna mendukung kebersihan dan keamanan pasar, setiap pedagang dikenakan biaya Rp400.000,00 per bulan. Pengelola pasar BSD selalu melaksanakan koordinasi secara rutin guna memastikan maujudnya kebersihan, keamanan, dan ketertiban pasar maupun parkir.

Selain modernisasi fisik, pengembangan pasar BSD juga dilakukan melalui modernisasi non fisik. Termasuk dalam langkah ini adalah penerapan manajemen barang, pedagang, pelayanan, dan lingkungan. Untuk memudahkan konsumen, mekanisme pembayaran di

pasar BSD bisa dilakukan secara tunai maupun non tunai melalui jasa bank sebagaimana pasar modern. Pengelola pasar juga mengupayakan peningkatan kapasitas para pedagang melalui pasar rakyat *school* yang diadakan satu bulan sekali. Kegiatan *capacity building* tersebut melibatkan perbankan, unsur swasta lainnya, dan unsur pemerintah. Materi yang pernah diberikan melalui pasar rakyat *school*, antara lain pengelolaan keuangan pedagang, teknik peningkatan penjualan komoditas pasar, peningkatan modal pedagang melalui perbankan, dan sebagainya.

Pengelolaan pasar BSD tidak hanya mengakomodir para pedagang yang menempati ruko, kios, serta lapak/los di pasar tersebut. Pengelola pasar BSD memberi kesempatan kepada PKL-PKL di sekitar pasar untuk membuka kafe tenda mulai pukul 17.00 hingga 24.00 WIB. Bagi anggota PKL yang membuka kafe tenda dikenakan biaya sewa Rp2.200.000,00 per bulan serta iuran kebersihan dan keamanan sebesar Rp400.000,00 per bulan.

2. Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Manis

Pasar Manis berjarak \pm 1 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas, tepatnya di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat. Selain pasar Manis, di Purwokerto juga ada pasar tradisional

lainnya, seperti pasar Wage, pasar Cikebrok, dan pasar Cerme. Sementara, beberapa pasar modern di Purwokerto adalah Intan department store, Matahari department store, Moro supermarket, Rita pasaraya, dan Rita supermall

Pasar Manis dibangun pada tahun 1970. Selain faktor umur pasar, kondisi pasar Manis yang seperti pasar tradisional pada umumnya mendukung persyaratan pengusulan revitalisasi pasar tersebut. Dinperindagkop serta Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang (DCKKTR) Kabupaten Banyumas menyusun *Detailed Engineering Design* (DED) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) beserta dokumen pendukung lainnya. Penyusunan DED mengacu pada bangunan fisik pasar Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang karena ketika itu belum ada *policy guidelines* revitalisasi pasar tradisional. Sementara, RAB revitalisasi Pasar Manis hanya mencakup anggaran perbaikan fisik pasar.

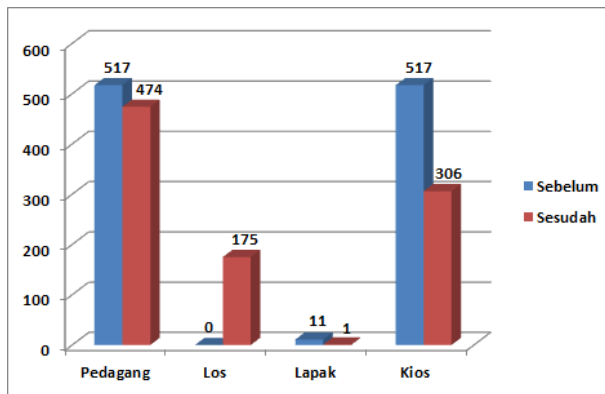
Setelah melalui proses konsultasi serta aspek teknis dan administratif bisa diterima oleh Kemendag, pasar Manis pun direvitalisasi dalam 2 tahapan. Tahap I mulai 30 Juni 2015 dan selesai pada 4 Mei 2016, serta tahap II mulai pada Juli 2016 dan selesai Desember 2017. Hasil revitalisasi pasar secara keseluruhan keseluruhan, luas lahan 5.925 m², luas bangunan 4.930 m², dan luas lahan parkir

1.076 m². Keseluruhan biaya untuk revitalisasi pasar Manis sebesar ± Rp 19 M. Meski demikian, relatif tidak ada ruang partisipasi bagi pedagang dalam proses pembangunan fisik pasar Manis tahap I maupun II.

Pada pembangunan tahap II dibangun *basement* untuk perluasan area parkir sekaligus memenuhi persyaratan pengajuan pasar Manis sebagai pasar SNI 8152. Implikasi pembangunan *basement*, bagian barat pasar Manis tampak dua lantai di mana lantai bawah sebagai area parkir dan lantai atas berupa kios-kios pedagang). Meski demikian, Dinperindag dan pengelola pasar menganggap pasar Manis sebagai pasar satu lantai sesuai ketentuan Kemendag, sementara pedagang menganggap sisi barat pasar Manis terdiri dari dua lantai.

Setelah proses revitalisasi, jumlah pedagang, kios, los pun berubah. Berikut data pedagang, kios, los sebelum dan setelah revitalisasi pasar Manis.

Gambar 2. Jumlah Pedagang, Kios, dan Los Sebelum dan Setelah Revitalisasi



Sumber: UPT Pasar Manis, 2017

Setelah revitalisasi, pasar Manis dikelola oleh UPT Pasar Manis yang merupakan pelaksana teknis bidang Pengelolaan Pasar Dinperindag Kabupaten Banyumas. UPT Pasar Manis mempunyai 7 pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 14 pegawai berstatus harian lepas, yang terdiri dari: 1 orang kepala pasar, 4 staf, 8 tenaga kebersihan, dan 9

orang tenaga keamanan. Model pengelolaan berbentuk UPT ini dapat berimplikasi pada ketiadaan standar kemampuan dan pengalaman pengelolaan pasar karena akan sangat tergantung pada aparatur yang ditugaskan pada UPT tersebut.

Setelah revitalisasi, selain Pasar Manis menjadi pasar yang bersih, sirkulasi udara sangat baik sehingga nyaman bagi pedagang maupun pembeli/pengunjung, juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang bagi kegiatan ekonomi pedagang dan pembeli. Tabel 2 berikut menggambarkan peningkatan fasilitas pasar Manis setelah kebijakan revitalisasi pasar tradisional.

Tabel 2. Fasilitas Umum Pasar Manis Sebelum dan Setelah Kebijakan Revitalisasi

No.	Fasilitas Pasar	Sebelum Revitalisasi	Setelah Revitalisasi
1.	Mandi Cuci Kakus (MCK)	Tidak ada	12 buah
2.	Parkir	Di pinggir jalan raya	1.076 m ²
3.	Mushala	Tidak ada	1 buah seluas 42,5 m ²
4.	Ruang Laktasi	Tidak Ada	1 buah
5.	Ruang Kesehatan	Tidak Ada	1 buah
6.	Pos Tera Ulang	Tidak Ada	1 buah
7.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Tidak Ada	8 buah
8.	Hidrant	Tidak Ada	6 buah
9.	Pompa Air	Tidak Ada	1 buah
10.	Penerangan Umum	Tidak Memadai	Ada (23 ribu watt)
11.	Saluran Pembuangan	Tidak Ada, Buruk	Ada, Baik
12.	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Tidak Ada	Ada (60 m ²)
13.	Tempat Pemilahan Sampah	Tidak Ada	1 buah
14.	TPS Sementara	Ada	Ada, volume 66 m ²
15.	Waktu Operasional Pasar	05.00–12.00	05.00–16.00
16.	Pos Keamanan	Tidak Ada	1 buah

Sumber: UPT Pasar Manis 2017.

Setelah revitalisasi, dilakukan perubahan sistem pengelolaan pasar Manis yang meliputi:

- a. Pengaturan hak dan kewajiban antara UPT pasar Manis dengan para pedagang. Namun, pengaturan tersebut tidak tertulis sehingga akan berimplikasi pada penyelesaian permasalahan jika terjadi permasalahan.
- b. Penerapkan zonasi, yang mengacu pada kriteria pasar sehat, yaitu pembagian area sesuai dengan sifat, jenis komoditi dan klasifikasinya. Namun setelah dua tahun, sistem zonasi mulai dilanggar pedagang karena ketidaktegasan pengelola pasar. Selain itu, meski diterapkan sistem zonasi, namun *display* barang dagangan masih kurang tertata dan kurang menarik.
- c. Fasilitas untuk mempermudah konsumen ketika berbelanja, seperti troli, pemantauan dan informasi harga terkini komoditas pasar melalui layar monitor di dinding pasar, dan program transaksi non tunai (SiNona). Namun yang disayangkan pemanfaatan SiNona hanya berlangsung selama 6 bulan dari pertama kali SiNona *dilaunching* pada 26 Oktober 2016.
- d. Penyusunan 18 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan pasar, yang antara lain mengatur tentang

pengenaan retribusi dan pajak pasar, kebersihan dan penanganan sampah, pengawasan barang dagangan, dan lainnya. Namun demikian, penyusunan SOP tersebut tidak terlepas dari upaya pasar Manis agar bisa meraih predikat pasar SNI 8152. SOP yang telah disusun juga belum tersosialisasikan secara baik kepada pedagang, dan belum semuanya bisa dilaksanakan secara konsisten. Akibatnya, keberadaan SOP belum mampu meningkatkan pengelolaan pasar Manis secara optimal.

- e. Pengelolaan kebersihan dan keamanan pasar. Lantai pasar setiap saat dibersihkan, dan secara berkala dipel oleh petugas kebersihan. Apabila diminta, petugas juga bisa membersihkan kios dan lapak pedagang. Pedagang dikenai biaya kebersihan Rp200,00 per hari dan Rp1.000,00 per hari untuk kios atau lapak. Untuk keamanan pasar, dibentuk petugas keamanan pasar yang direkrut dari para preman pasar Manis sebelum revitalisasi. Petugas keamanan bertugas 24 jam yang terbagi atas 3 shift sehingga pedagang merasa aman meninggalkan barang dagangannya di pasar.

Selain aspek di atas, dikaji juga bagaimana pendapatan pedagang setelah revitalisasi pasar Manis. Berdasarkan

penelitian, diketahui sebagian pedagang pasar Manis mengalami peningkatan pendapatan, dan sebagian lainnya mengalami penurunan, dan bahkan ada yang terpaksa menutup kiosnya. Fenomena tersebut dalam pandangan UPT pasar Manis lebih ditentukan oleh pedagang itu sendiri. Pengelola UPT telah melaksanakan tanggung jawabnya yakni menyediakan fasilitas untuk pedagang. Namun, bagaimana kualitas komoditas dan pelayanan oleh pedagang, serta implikasinya kepada pendapatan mereka, sepenuhnya diserahkan kepada para pedagang.

UPT pasar Manis belum mampu mengupayakan peningkatan kapasitas manajemen bagi pedagang pasar karena keterbatasan anggaran. Namun UPT pasar Manis telah memberdayakan pedagang melalui revitalisasi paguyuban dan memfasilitasi pembentukan koperasi pedagang. Meski demikian, pembentukan paguyuban pedagang merupakan salah satu prasyarat sebuah pasar tradisional untuk bisa direvitalisasi. Sedangkan manfaat koperasi bagi pedagang, melalui fasilitasi oleh koperasi dan Dinperindag, pedagang dapat memperoleh pinjaman modal dari bank yang telah bekerja sama dengan kedua institusi tersebut. Melalui koperasi, pedagang juga bisa 'kulakan' dari produsen atau tangan pertama pemegang komoditas tertentu.

Perubahan signifikan lainnya yang tampak setelah revitalisasi pasar Manis adalah tersedia area kuliner yang representatif. Area kuliner ini hanya buka sesuai jam operasional pasar, yang seringkali ramai ketika akhir pekan atau hari libur. Pada sore hingga malam hari, di bagian luar pasar Manis dibuka cafe tenda sehingga setelah revitalisasi aktivitas pasar Manis hingga malam hari.

3. Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional untuk Pengembangan Pasar Tradisional Pada Umumnya.

Telah diuraikan di atas, belum ada *policy guidelines* untuk kebijakan revitalisasi pasar tradisional ketika implementasi kebijakan tersebut di pasar Manis. *Policy guidelines* dalam bentuk "Panduan Proposal Sarana Distribusi Perdagangan" baru ditetapkan pada 2017 oleh Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi Kemendag. Berdasarkan kajian terhadap "Panduan Proposal Sarana Distribusi Perdagangan" serta hasil penelitian, dapat dirumuskan bahwa kebijakan revitalisasi pasar tradisional untuk pengembangan pasar tradisional pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Perhatikan dan laksanakan apa yang telah ditentukan dalam "Panduan Proposal Sarana Distribusi Perdagangan", meliputi: revitalisasi fisik, revitalisasi manajemen,

revitalisasi ekonomi, dan revitalisasi sosial.

- b. Selain memperhatikan langkah-langkah atau aspek-aspek dalam setiap jenis revitalisasi dalam “Panduan Proposal Sarana Distribusi Perdagangan”, juga perlu diperhatikan aspek-aspek berikut berdasarkan kajian di pasar BSD Serpong dan pasar Manis Purwokerto, sebagai berikut:

- (1). Aspek terkait revitalisasi fisik:
 - (a). *Layout* dan alur pengunjung yang menguntungkan keseluruhan pedagang
- (2). Aspek terkait revitalisasi manajemen:
 - (a). MoU antara pedagang dan pengelola pasar
 - (b). Pengawasan dan penegakan MoU dan tata tertib pasar oleh pengelola pasar secara konsisten dan tegas
 - (c). Kerjasama dengan BPOM dan kepolisian
 - (d). Meningkatkan team work pengelola pasar, misal melalui koordinasi rutin antar bagian dari pengelola pasar
 - (e). Peningkatan kapasitas manajerial pedagang
- (3). Aspek terkait revitalisasi ekonomi

(a). Menjalin kerjasama dengan perbankan untuk membantu permodalan para pedagang pasar

(b). Menjalin kerja sama dengan *supplier* utama komoditas pasar tradisional

(4). Aspek terkait revitalisasi sosial

(a). Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya untuk mewujudkan “sekolah pasar” sebagai media untuk meningkatkan kapasitas pedagang.

Langkah-langkah perpaduan dalam “Panduan Proposal Sarana Distribusi Perdagangan” dengan hasil penelitian ini, apabila digambarkan dalam bentuk model, tampak pada lampiran artikel ini.

PEMBAHASAN

“Panduan Proposal Sarana Distribusi Perdagangan” (Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi, 2017) menjelaskan, ada 4 aspek dalam kebijakan revitalisasi pasar tradisional, yaitu revitalisasi fisik, manajemen, ekonomi, dan sosial. Keempat aspek tersebut harus menjadi perhatian dan dilaksanakan oleh pemkab/kota yang melaksanakan kebijakan pasar tradisional.

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian di atas, meski belum memenuhi secara keseluruhan, tampak kepatuhan dari Pemkab Banyumas terhadap empat aspek kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Kepatuhan pada aspek revitalisasi fisik, tampak pada pembangunan prasarana dan sarana fisik pasar Manis. Melalui dua tahap pembangunan, telah terbangun prasarana fisik pasar, mulai dari gedung pasar, kios, los, lapak, dan prasarana pasar lainnya. Sementara pada sisi sarana, telah tersedia fasilitas dan sarana berdagang dan berbelanja bagi pedagang dan pengunjung atau konsumen. Hal lain menyangkut revitalisasi fisik, yakni tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame, dan ruang terbuka kawasan, juga telah tersedia di pasar Manis. Pemenuhan terhadap aspek revitalisasi fisik ini, sekaligus menunjukkan kepatuhan Pemkab Banyumas terhadap ketentuan aspek revitalisasi ekonomi. Bahwa perbaikan fisik kawasan pasar adalah bersifat jangka pendek untuk mengakomodasi kegiatan ekonomi formal dan informal.

Sementara dari dua aspek lainnya, pada revitalisasi manajemen sebagian dari aspek tersebut telah dilaksanakan, yakni hak dan kewajiban pedagang (meski tidak tertulis), tata cara penempatan pedagang melalui sistem zonasi, penyediaan fasilitas-fasilitas di pasar, serta penyusunan SOP. Pada revitalisasi sosial, setidaknya pasar

Manis telah menjadi lingkungan menarik, yang tampak pada relatif ramainya area kuliner terutama ketika akhir pekan. Dalam jangka panjang ke depan, kondisi tersebut akan bisa berdampak pada dinamika kehidupan sosial masyarakat. Selain hal tersebut, direkrutnya sebagian anggota masyarakat di sekitar pasar Manis sebagai tenaga kebersihan dan keamanan pasar, sedikit banyak menunjukkan terpenuhinya revitalisasi sosial.

Kepatuhan Pemkab Banyumas terhadap kebijakan Kemendag di atas, tampak mendukung tesis Ripley tentang evaluasi formatif dalam kebijakan publik. Ripley (1985) menjelaskan, ada dua aspek atau perspektif utama terkait dengan evaluasi implementasi kebijakan, yaitu *compliance* dan *what's happening*.

Uraian tentang bagaimana Pemkab Banyumas mengimplementasikan kebijakan revitalisasi pasar tradisional di pasar Manis menunjukkan aspek *compliance*. Tidak hanya pada aspek-aspek tersebut, kepatuhan Pemkab Banyumas dalam proses implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional mulai dari penyusunan DED dan RAB dan seterusnya kepada Kemendag menunjukkan kepatuhan dari agen-agen dan birokrat-birokrat yang ada pada posisi sub ordinat (dalam hal ini Pemkab Banyumas) kepada pemerintah-perintah mereka yang ada di posisi superior (dalam hal ini Kemendag).

Tingginya derajat kepatuhan Pemkab Banyumas kepada Kemendag, tampak menunjukkan sisi positif hasil dari implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional meski belum sepenuhnya seperti yang diharapkan kebijakan tersebut.

Pada sisi lain, fokus *compliance* dipandang sangat terbatas karena hanya mempertanyakan bagaimana program telah dijalankan. Fokus *what's happening* lebih luas lagi karena mencakup juga aspek *short-range* dari akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu program.

Terkait dengan hal di atas, tampak bahwa ada faktor-faktor lain di luar kepatuhan aparat pelaksana, turut mempengaruhi implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Bahwa pembangunan fisik pasar tradisional yang memakan waktu cukup lama, telah menyebabkan sebagian pelanggan pedagang pasar Manis berpindah ke pasar lain. Pada sisi lain, keinginan pedagang untuk berganti komoditas atau barang dagangannya juga implementasi kebijakan revitalisasi pasar. Pun keinginan Pemkab Banyumas agar pasar manis bisa menjadi pasar SNI sehingga harus mengikuti tuntutan ketentuan pasar SNI 8152, pada giliran selanjutnya berpengaruh terhadap implementasi kebijakan revitalisasi pasar Manis beserta hasil-hasilnya. Hasil penelitian ini mendukung tesis Ripley (1985) tentang perspektif

what's happening, yang mempunyai asumsi banyak faktor yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan atau program.

Pada pasar BSD Serpong, sebagaimana diuraikan di atas, tampak telah melakukan langkah-langkah seperti: menerapkan sistem zonasi; menawarkan berbagai jenis barang dagangan; melakukan MoU antara pedagang dan pengelola; menyediakan layanan pengantaran barang, aplikasi, dan fasilitas *e-money*; dan penentuan harga barang melalui tawar-menawar dan pengecekan harga. Langkah-langkah pasar BSD Serpong tersebut tampak selaras dengan bauran berbagai unsur yang digunakan ritel untuk memuaskan kebutuhan konsumen, yaitu: jenis barang yang dijual; perbedaan dan keanekaragaman barang yang dijual; tingkat layanan konsumen; dan harga barang (Utami, 2006). Penerapan bauran berbagai unsur tersebut tampak memuaskan konsumen pasar BSD Serpong.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Proses modernisasi pasar tradisional di pasar BSD Serpong dilakukan melalui modernisasi fisik dan non fisik. Setelah modernisasi fisik pasar, pasar BSD

Serpong menjadi lebih bersih, luas, dan nyaman untuk dikunjungi. Sedangkan modernisasi non fisik melalui modernisasi manajemen pasar serta Pasar Rakyat School yang dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya peningkatan kapasitas manajemen pedagang.

2. Implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional di pasar Manis Purwokerto lebih fokus pada aspek fisik pasar. Sedangkan revitalisasi manajemen, sosial, dan ekonomi sudah diupayakan namun belum maksimal karena keterbatasan anggaran serta belum adanya *policy guidelines* kebijakan revitalisasi pasar tradisional yang dapat membimbing implementor kebijakan.
3. Kebijakan revitalisasi pasar tradisional seharusnya mencakup revitalisasi fisik, manajemen, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh, sehingga tujuan revitalisasi pasar tradisional dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James, 1979, *Public Policy Making, (Second ed.)*, New York : Holt, Rinehart and Winston, New York.
- Arikunto S, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed Revisi VI, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy. 3th* (Englewood Cliffs, NJ; Prentice
- Grindle, Merilee S.ed). 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princetown University Press
- Poesoro, Adri. 2007. *Jurnal Semeru*. No. 22 Hal. 2.
- Purwanto, Erwan Agus. Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
- Robert K. Yin, 2012. *Studi Kasus Desain & Metode*, Raja Grafindo Jakarta.
- Sabatier, P.A. 1986. *Top-down and Bottom-up Approach to Implementation Research : A Critical Analysis and Suggested Synthesis*, *Journal of Public Policy*, 6 : 21- 48.
- Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152 tentang Pasar Rakyat
- Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Utami, Christina Whidya. 2006. *Manajemen Ritel Strategi dan Implementasi Ritel Modern*. Jakarta: Salemba Empat
- Revitalisasi Pasar Tradisional-
<http://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/96>
- Pengembangan Rancangan Revitalisasi Pasar Tradisional-
<http://www.lppm.itb.ac.id/wp-content/uploads/2012/11/Agus-S-Ekomadyo.pdf>
- Revitalisasi Pasar TradisionalIPB -
http://ariefdaryanto.blog.mb.ipb.ac.id/files/2010/07/Revitalisasi-Pasar-Tradisional_Agu09.pdf

Kajian PU tentang pasar tradisional-
<http://www.pu.go.id/uploads/services/infopublik20130506123916.pdf>

Sekab.<http://www.presidentri.go.id/artikel-terpilih/mensukseskan-program-revitalisasi-pasar-tradisional.html>. diakses pada 26 Oktober 2017 pukul 12.50